

Penerapan Pajak Pertambahan Nilai 11% Dan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kota Bitung

Pricilia Joice Pesak¹, Michael Miran², Ahmad Gazali³, Alfred Salindeho⁴

Universitas Negeri Manado -¹priciliapesak@unima.ac.id

-²michael.miran@unima.ac.id

Sekolah Tinggi Bisnis dan Manajemen Dua Sudara -³a.gazali001@gmail.com

-⁴alfredsalindeho9@gmail.com

Abstrak— *The higher the VAT rate is set, the more difficult it is to get the desired income because these UMKM still use the actual selling price without adding the price before VAT, when the price after VAT is recorded, it is difficult for the buyers to know the exact price amount and most of the buyers do not pay the VAT charged and this will affect the UMKM income because the income which should be a profit but becomes a loss because it has to cover the VAT rate charged to the buyer will be deposited with the government. This study aims to test whether the application of VAT affects UMKM's income. Based on the results of hypothesis testing, it is known that the sig value is 0.004 <0.05 and the t-table is 1.701, so 3.127> 1.701, which means that the application of VAT affects the income level of a UMKM. The results showed that the application of 11% VAT affects the income level of an MSME, which means that the higher the VAT rate, the more it will affect the income of an MSME.*

Keywords: *Value Added Tax; Income; MSME*

1. PENDAHULUAN

Pendapatan adalah total penjualan barang atau jasa suatu komoditi. Pendapatan adalah hasil yang dapat diperoleh dari kegiatan operasi yang dilakukan perusahaan (Khaeria, A. N., Murthi, N. L. P. T., Triadji, T. P., & Azizah, 2023). Pendapatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kinerja dan pertumbuhan usaha. Pendapatan UMKM dapat didefinisikan sebagai total penerimaan yang diperoleh UMKM dari hasil penjualan produk barang atau jasa dalam suatu periode tertentu. Pendapatan UMKM merupakan merupakan sumber dari penghasilan atau tambahan kekayaan yang diperoleh untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Khaeria, A. N., Murthi, N. L. P. T., Triadji, T. P., & Azizah, 2023).

Keberadaan UMKM di Kota Bitung sangatlah membantu pertumbuhan ekonomi dimana UMKM memberikan kontribusi terhadap pemerintah dengan membayar pajak untuk keberlangsungan Kota Bitung. Informasi menunjukkan bahwa UMKM memainkan peran penting baik di Indonesia maupun di perekonomian global. UMKM sering menghadapi tantangan untuk berkembang dan bertahan karena mereka menghadapi lebih banyak masalah daripada perusahaan besar, salah satu masalahnya yaitu pajak (Mahmud et al., 2023).

UMKM merupakan pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2021 Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi. UMKM adalah wajib pajak yang harus membayar pajak pertambahan nilai, bagi pelaku UMKM pajak dinilai sebagai beban yang sebisa mungkin harus dihindari. Pemerintah Indonesia perlu memperhatikan sektor UMKM secara serius. Peranan UMKM dalam perekonomian harus ikut diperhitungkan dalam proses merencanakan suatu kebijakan dibidang perpajakan.

Menurut Undang-undang nomor 42 Tahun 2009, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) di daerah pabean. PPN adalah pajak tidak langsung di mana beban pajak dapat dialihkan kepada pihak lain. Subjek PPN adalah pengusaha kena pajak (PKP) yang melakukan penyerahan BKP atau JKP. PKP harus mendaftar untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak. Sebelumnya

Halaman 885

dalam pasal UU PPN dikenakan tarif 10% dengan masa berlaku 1 Januari 1984-1 Maret 2022 sekarang naik menjadi 11% berlaku pada tanggal 1 April 2022 serta 12% berlaku paling lambat diberlakukan 1 Januari 2025 (Wesley & Sitompul, 2023). Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan alasan utama kenaikan tarif PPN 11 persen adalah untuk memperbaiki kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang secara berturut-turut mengalami defisit selama pandemi dengan meningkatkan pemasukan penerimaan negara. Dibutuhkan terobosan baru yang dapat memperbaiki kondisi APBN dan mengembalikan surplusnya. Karena tarif PPN Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara lain, pemerintah memilih PPN sebagai ruang untuk pemulihian APBN.

Terdapat kesenjangan antar beberapa peneliti sebelumnya yang membahas pengaruh penerapan PPN terhadap keberlangsungan UMKM salah satunya terhadap daya beli konsumen, penetapan harga jual dan sebagainya (Chrisna Saragih et al., 2023; Maulida, 2023; Rahmah et al., 2020; Wesley & Sitompul, 2023; Yudistira, 2024). Menurut (Rahmah et al., 2020) menyatakan bahwa yang mempengaruhi pendapatan UMKM yaitu modal, lokasi dan penggunaan teknologi. Namun sebagian besar peneliti mengatakan bahwa penerapan PPN pada suatu UMKM berpengaruh signifikan terhadap daya beli dan penentuan harga jual yang akan berkelanjutan juga pada pendapatan UMKM tersebut (Pratiwi et al., 2022; Yudistira, 2024).

Melalui wawancara yang dilakukan kepada salah satu pelaku UMKM yang menjadi objek pajak dalam penerapan PPN di RM. Suroboyo Bitung mengatakan bahwa masalahnya yaitu pada pendapatan yang dihasilkan dari penjualan, dimana semakin tinggi tarif PPN yang ditetapkan akan semakin kesulitan untuk mendapatkan pendapatan yang diinginkan karena UMKM tersebut masih menggunakan harga jual yang sebenarnya tanpa menambahkan harga sebelum PPN, ketika harga sesudah PPN tercatat maka pembeli kesulitan untuk mengetahui besaran harga sebenarnya serta kebanyakan pembeli tidak membayar PPN yang ditagihkan dan hal tersebut akan mempengaruhi pendapatan UMKM karena pendapatan yang harusnya menjadi keuntungan tapi menjadi rugi karena harus menutupi tarif PPN yang ditagihkan ke pembeli akan disetorkan ke pemerintah. Diberlakukannya kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% sejak 1 April 2022. Tentunya banyak menimbulkan pro dan kontra dari masyarakat atas kenaikan tarif pajak tersebut. Kenaikan tarif PPN tentunya sesuai dengan aturan Harmonisasi Peraturan Perpajakan menetapkan kenaikan tarif pajak

Menurut penelitian sebelumnya juga yang dilakukan oleh (Maulida, 2023), bahwa PPN berpengaruh terhadap daya beli konsumen. PPN yang tinggi dapat mengurangi daya beli konsumen. Jika ada kenaikan harga yang signifikan dapat menjadi dampak negatif PPN pada daya beli konsumen yang akan mempengaruhi pendapatan pada UMKM. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada masalah yang terjadi, dimana peneliti sebelumnya menemukan masalah setelah pemberlakuan PPN maka pengusaha atau pelaku UMKM menghadapi kenaikan harga yang berpengaruh pada daya beli konsumen. Pada variabel dependen, pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Maulida, 2023) variabel dependen yang digunakan yaitu Daya Beli Konsumen, sedangkan pada penelitian ini variabel dependen yang digunakan yaitu Pendapatan UMKM. Tidak hanya terletak pada variabelnya tapi juga pada objek penelitian yang dilakukan sebelumnya pada pengusaha Sepatu di Cibaduyut, sedangkan penelitian ini dilakukan pada UMKM yang ada di Kota Bitung. Penelitian ini akan dilakukan pada UMKM di Kota Bitung dengan mengumpulkan data UMKM yang menjadi PKP pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Bitung dan akan mengambil sampel dari populasi yang ditentukan.

Tarif PPN sebelumnya yaitu 10% berlaku sampai Maret 2022, dan pada bulan April tahun 2022 tarif PPN resmi naik menjadi 11% sampai pada Junuari 2025 PPN naik menjadi 12%, besaran PPN ini sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan suatu UMKM. Menurut (Fahmi & Faisal, 2023) PPN memengaruhi keuntungan atau laba usaha. (Yudistira, 2024) mengatakan bahwa penerapan PPN 11% berpengaruh negatif terhadap pendapatan UMKM, ketika tarif PPN naik maka harga barang produksi dan harga jual akan lebih mahal yang mengakibatkan penurunan daya beli sehingga mengurangi pendapatan. Penelitian yang dilakukan (Chrisna Saragih et al., 2023) menyatakan perubahan harga jual dan daya beli menurun ketika perubahan tarif PPN menjadi 11% dan margin keuntungan akan mempengaruhi strategi bisnis dalam persaingan bisnis. Tujuan penelitian ini untuk membuktikan bahwa penerapan PPN 11% berpengaruh negatif terhadap pendapatan UMKM di Kota Bitung.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, pendekatan kausal atau eksperimen kuantitatif digunakan untuk menentukan sebab-akibat antar variabel. Dalam metode kuantitatif, pendekatan sebab dan akibat, di mana segala sesuatu ada karena ada sebabnya adalah salah satu asumsi ilmu yang dikenal sebagai pendekatan kausal (Sidiq & Chori, 2019). SPSS versi 25 adalah program komputer yang digunakan untuk mengolah, perhitungan, dan analisis statistik data. Ini mencakup alat ukur untuk pendekatan kausal atau eksperimen kuantitatif, termasuk uji regresi linear sederhana.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar dampak penerapan PPN pada pendapatan UMKM. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dengan pendekatan kausal atau sebab akibat. Populasi dalam penelitian ini adalah UMKM yang berada di Kota Bitung dengan jumlah per tahun 2023 yaitu 6000 UMKM. Jenis sampel non-probabilitas digunakan dalam penelitian ini karena tidak ada peluang yang sama bagi setiap elemen atau anggota populasi untuk diambil sebagai sampel. Adapun kriteria yang dijadikan sebagai sampel penelitian yaitu UMKM yang menjadi objek pajak di Kecamatan Maesa serta telah menjadi Pengusaha Kena Pajak dan menerapkan PPN tarif 11%.

Pajak Pertambahan Nilai adalah variabel bebas dalam penelitian ini. Meskipun tarif PPN naik, masyarakat akan menikmati hasil penerimaan PPN, yang merupakan salah satu jenis pajak tidak langsung. Tarif pajak adalah persentase yang ditetapkan sebagai dasar bagi wajib pajak untuk membayar pajak terhadap objek pajak. Indikator PPN penelitian ini diambil dari penelitian (Julito, K.A; Ramadani, 2024) yang terdiri atas tiga dimensi yaitu pengetahuan PPN, pengenaan PPN dan tarif PPN. Dimensi pengetahuan PPN terdiri atas empat indikator, sedangkan dimensi pengenaan PPN dan Tarif PPN terdiri atas 3 indikator. Variabel Pendapatan UMKM adalah variabel terikat dalam penelitian ini. Menurut (Erawati & Pramelia, 2022; Yani et al., 2024), indikator pendapatan adalah peningkatan hasil, kecakupan hasil, dan perkembangan.

Penelitian ini menggunakan data primer, yaitu data yang dikumpulkan secara langsung melalui penyebaran kuesioner online melalui *Google Forms*. Uji validitas dan reliabilitas dilakukan untuk menguji apakah pernyataan dalam kuesioner valid dan reliabel. Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik seperti uji normalitas, heterokedastisitas dan multikolinearitas. Setelah itu, dilakukan uji hipotesis. Adapun persamaan regresi linear sederhana penelitian ini adalah:

$$Y = a + bX$$

Keterangan :

Y = Pendapatan UMKM

X = Pajak Pertambahan Nilai

a = Konstanta

b = koefisien regresi

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Studi ini bertujuan untuk menentukan bagaimana penerapan pajak pertambahan nilai berdampak pada pendapatan UMKM di Kota Bitung. Untuk mengetahui hal ini, kuesioner dibagikan kepada 30 pelaku umkm dengan kriteria tertentu. Kuesioner ini didistribusikan secara online melalui formulir Google dengan skala likert 1-5. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dan data yang dihasilkan adalah angka yang diolah menggunakan SPSS Versi 25

Karakteristik

Karakteristik responden merupakan ciri-ciri atau sifat suatu individu responden. Pada penelitian ini, karakteristik yang digunakan yaitu :

Karakteristik Jenis Kelamin

Karakteristik jenis kelamin penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-Laki	14
Perempuan	16
Total	30

Sumber: data diolah, 2024

Penelitian ini menggunakan 30 responden, berdasarkan jenis kelamin terdiri atas 14 responden berjenis kelamin laki-laki dan 16 responden berjenis kelamin perempuan, yang menunjukkan bahwa pemilik usaha mikro, kecil menengah terbanyak di Kota Bitung, terutama di Kecamatan Maesa, adalah Perempuan.

Karakteristik Usia

Karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Karakteristik Usia

Usia	Jumlah
< 25 Tahun	1
25-30 Tahun	7
31-35 Tahun	6
36-40 ahun	5
>40 Tahun	11
Total	30

Sumber: data diolah, 2024

Penelitian ini menemukan bahwa pemilik usaha mikro, kecil dan menengah di Kota Bitung, terutama di Kecamatan Maesa terbanyak adalah berusia di atas 40 tahun.

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk menentukan seberapa baik setiap elemen dalam daftar pertanyaan untuk menentukan variabel tertentu. Dalam kasus ini, alat ukur yang digunakan adalah kuesioner. Uji validitas dilakukan jika angka yang dihasilkan lebih dari 0,361 dengan taraf signifikan 5% untuk tiga puluh peserta. Ini adalah hasil olahan data:

Tabel 3. Uji Validitas

Variabel	Indikator	R Hitung	R Tabel	Keterangan
PPN (X)	X1	0,745	0,361	VALID
	X2	0,649	0,361	VALID
	X3	0,822	0,361	VALID
	X4	0,933	0,361	VALID
	X5	0,853	0,361	VALID
	X6	0,828	0,361	VALID
PENDAPATAN (Y)	Y1	0,838	0,361	VALID
	Y2	0,928	0,361	VALID
	Y3	0,848	0,361	VALID
	Y4	0,844	0,361	VALID

Sumber: data diolah, 2024

Tabel 3 menunjukkan dua variabel yang berfungsi sebagai indikator penelitian; variabel independen terdiri dari enam pernyataan dan variabel dependen terdiri dari empat pernyataan, sehingga total pernyataan dalam kuesioner adalah sepuluh. Nilai r hitung dari kedua variabel ini lebih besar daripada nilai r tabel. Dengan demikian, data dari responden dianggap valid.

Uji Reliabilitas

Uji reabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah kuesioner dapat mengukur konsistensi atau stabilitas jawaban pernyataan dari waktu ke waktu. Karena koefisien Alpa atau metode Cronbach Alpha $>0,7$, kuesioner dianggap reliabel untuk penelitian ini.

Tabel 4. Uji Reliabilitas

<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>N of Items</i>
0,896	10

Sumber: data diolah, 2024

Nilai metode *Cronbach Alpha* untuk olah data ini adalah 0,896, yang berarti $>0,7$, seperti yang ditunjukkan dalam tabel 4.

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menentukan apakah kuesioner yang disebarluaskan terdistribusi normal. Jika signifikansinya lebih dari 0,05, maka distribusi normal, dan jika signifikansinya kurang dari 0,05, maka distribusi tidak normal. Hasil uji normalitas adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardize Residual				
<i>N</i>			30	
<i>Normal Parameters a,b</i>		<i>Mean</i>	00000	
<i>Most Differences</i>	<i>Extream</i>	<i>Std. Deviation</i>	1,81076284	
		<i>Absolute</i>	0,129	
		<i>Positive</i>	0,097	
		<i>Negative</i>	-0,126	
<i>Test Statistic</i>			0,126	
<i>Asymp Sig (2-tailed)</i>			0,200 c,d	

Sumber: data diolah, 2024

Berdasarkan hasil uji normalitas pada table 5 menunjukkan bahwa data berdistribusi normal, karena hasil uji normalitas menunjukkan bahwa nilai Asymp Sig 0,200 lebih besar dari 0,05.

b. Uji Multikolinearitas

Metode *Tolerance* dan *VIF* digunakan untuk mengevaluasi korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Jika nilai *VIF* kurang dari 10 dan nilai *Tolerance* lebih dari 0,10, maka gelaja multikolinearitas tidak terjadi. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 6:

Tabel 6 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan	
PPN	1.000	1.000	Tidak	terjadi

Multikolinearitas

Sumber: data diolah, 2024

Jika nilai toleransi kurang dari 1 dan nilai VIF kurang dari 10, maka dapat dinyatakan bahwa tidak ada gejala multikolinearitas, seperti yang ditunjukkan dalam tabel 4.6.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas menggunakan uji glejser untuk mengetahui apakah model regresi mengalami ketidaksamaan variasi antara residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Tidak ada heteroskedastisitas dalam data jika nilai sig lebih besar dari 0,05.

Tabel 7 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig	Keterangan	
PPN	0,837	Tidak	terjadi

Heteroskedastisitas

Sumber: data diolah, 2024

Tabel 7 menunjukkan hasil uji heteroskedastisitas memiliki, yang menunjukkan nilai sig 0,837 lebih tinggi dari 0,05, yang menunjukkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Uji regresi sederhana digunakan untuk menentukan apakah variabel bebas mempengaruhi variabel terikat:

Tabel 8 Hasil Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	T	Sig
	B	Std. Error			
Constant	9,909	2,197		4,510	0,000
PPN	0,300	0,096	0,509	3,127	0,004

Sumber: data diolah, 2024

Berdasarkan tabel 8, ditunjukkan bahwa persamaan regresi diperoleh, yaitu $Y=9.909 + 0,300X$, di mana variabel x memiliki koefisien 0,300 dan variabel y memiliki nilai konstan 9.909 dan koefisien positif 0,300. Ini menunjukkan bahwa ada pengaruh antara variabel x dan variabel y, yang berarti bahwa ketika variabel x meningkat, akan mempengaruhi variabel y sebesar 0,300.

Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien Determinasi merupakan ukuran statistik yang menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Nilai determinasi ditentukan dengan nilai R Square.

Tabel 9 Koefisien Determinasi

Model	R	R Square
1	0,509	0,259

Sumber: data diolah, 2024

Berdasarkan tabel 9 menunjukkan nilai koefisien determinasi pada kolom R Square yaitu 0,259 dalam hal ini dinyatakan dalam persen sebesar 25,9% artinya variabel penerapan PPN 11% dapat menjelaskan 25,9% dari variabel pendapatan. Sementara itu, 74,1% adalah akibat dari variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Pengujian Hipotesis

Uji t dilakukan untuk mengevaluasi pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel dan signifikansinya kurang dari 0,05, maka H_0 diterima, menunjukkan bahwa variabel X memiliki pengaruh terhadap variabel Y:

Tabel 10 Hasil Uji Hipotesis

Variabel	T Hitung	Sig.	Keterangan
PPN	3,127	0,004	Signifikan

Sumber: data diolah, 2024

Hasil uji hipotesis ditunjukkan dalam tabel 10 dengan nilai sig 0,004 lebih kecil dari 0,05 dan nilai t hitung 3,127 lebih besar dari 1,701. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan PPN memengaruhi pendapatan UMKM secara signifikan, sehingga hipotesis diterima.

Pembahasan

Pengaruh Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Bitung

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang menunjukkan bahwa penerapan PPN 11% berpengaruh positif terhadap pendapatan UMKM. Hal ini berarti, semakin meningkat tarif PPN maka akan meningkatkan pendapatan UMKM. Dengan kata lain, kenaikan PPN 11 % tidak menurunkan niat beli konsumen pada UMKM di Kota Bitung khususnya di Kecamatan Maesa. Kenaikan PPN 11% justru mendorong pelaku UMKM untuk melakukan penjualan diatas rata-rata.

Hasil penelitian ini didukung oleh teori pilihan rasional (Coleman, 1995) yang menjelaskan bagaimana individu akan mengevaluasi pilihan mereka berdasarkan dampak finansial dari perubahan harga. Ketika harga barang atau jasa meningkat, pelanggan akan mempertimbangkan untuk mempertahankan pembelian atau mencari opsi yang lebih murah. Namun, Konsumen mungkin tetap membeli barang meskipun harganya naik karena tidak ada alternatif atau karena barang tersebut dianggap penting. Hasil penelitian ini juga didukung oleh hasil penelitian (Fadhiilah, A.F; Rachmawati, 2024) menunjukkan bahwa meskipun kenaikan tarif PPN dapat mempengaruhi niat beli, promosi penjualan media sosial tetap memiliki efek positif pada keputusan pembelian pelanggan. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan biaya karena PPN, pelanggan tetap mempertimbangkan faktor lain saat mereka memutuskan untuk membeli sesuatu.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan PPN tidak mengurangi keinginan konsumen untuk membeli produk UMKM, terutama di Kota Bitung, Kecamatan Maesa. Sebaliknya, kenaikan ini mendorong pelaku UMKM untuk meningkatkan kinerja penjualan, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan mereka. Ini menunjukkan bahwa pelanggan terus membeli barang dan jasa yang dijual oleh UMKM karena mereka dianggap penting dan tidak ada pilihan lain. Faktor lain, seperti promosi, juga memengaruhi keputusan mereka.

Penelitian ini menghasilkan beberapa saran untuk pelaku UMKM antara lain meningkatkan strategi pemasaran melalui penggunaan media sosial untuk mempromosikan produk dan jasa untuk mempertahankan dan menarik pelanggan, memastikan kualitas produk karena konsumen akan tetap memilih produk UMKM jika kualitasnya bagus dan Berinovasi pada produk dan layanan untuk tetap kompetitif, pelaku UMKM harus terus menyesuaikan produk mereka untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi pelanggan.

DAFTAR PUSTAKA

- Chrisna Saragih, L. D., Kambey, J. P., & Bacilius, A. (2023). Analisis Dampak Implementasi Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) 11% Pada Pt.Hasrat Abadi Outlet Tondano. *Jurnal Ekonomi,Kependidikan,Manajemen,Dan Akuntansi*, 1(4), 22–34. <https://jekma.feb-unima.com/index.php/jekma/article/view/51>
- Coleman, J. (1995). *Teori Pilihan Rasional*.
- Erawati, T., & Pramelia, N. (2022). E-commerce, Inovasi, Pricing, dan Pendapatan UMKM di Masa Pandemi Covid-19. *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4(5), 1449–1465. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v4i5.1046>
- Fadhiilah, A.F; Rachmawati, N. . (2024). APAKAH PROMOSI PENJUALAN MELALUI MEDIA SOSIAL DAN POTONGAN HARGA MEMENGARUHI NIAT BELI KONSUMEN DENGAN KENAIKAN TARIF PAJAK PENAMBAHAN NILAI SEBAGAI VARIABEL MODERASI? *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 13(1), 75–89. https://journal.budiluhur.ac.id/index.php/akeu/article/view/2415/pdf_39
- Fahmi, D., & Faisal, R. (2023). Efektivitas Penerapan PPN 11 Bagi Pelaku UMKM di Kecamatan

- Pamulang, Tangerang Selatan. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 2(3), 238–249.
- Julito, K.A; Ramadani, I. (2024). Pengaruh Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai Dan Digital Marketing Terhadap Keputusan Pembelian Di Generasi Z Dalam Transaksi E-Commerce Sebagai Pemoderasi. *Media Akuntansi Perpajakan*, 9(1), 28–40.
- Khaeria, A. N., Murthi, N. L. P. T., Triadji, T. P., & Azizah, C. Y. N. (2023). Pendapatan dan Beban. *ULIL ALBAB*, 2(2), 741–745.
- Mahmud, M., Mahmud, N. U. H., Abdi, C., Luthfina, N., & Fatimah, A. (2023). Proses Gabungan Koagulasi-Adsorpsi Menggunakan Material Lokal Tanah Lempung Gambut dan Adsorben Gambut untuk Menyisihkan Warna dan Organik pada Limbah Cair Sasirangan. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 21(4), 839–848. <https://doi.org/10.14710/jil.21.4.839-848>
- Maulida, F. (2023). Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Dan Harga Jual Pada Industri Sepatu Terhadap Daya Beli Konsumen. *Elibrary Unikom*. <http://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/9073>
- Pratiwi, Y. T., Andayani, A., & Soeparno, K. (2022). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Atas Transaksi Penjualan Barang Kena Pajak Pada Pt.Novapharin. *Income*, 3(2), 58–71. <https://doi.org/10.38156/akuntansi.v3i2.151>
- Rahmah, I., Kaukab, M. E., Yuwono, W., Pascasarjana, F., Yogyakarta, U. M., & Artikel, R. (2020). PERAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN UMKM. *Capital*, 3(2), 30–50. <https://capital.stiesemarang.ac.id/index.php/capital/article/view/39>
- Sidiq, U., & Chori, M. (2019). *METODE PENELITIAN KUALITATIF DI BIDANG PENDIDIKAN*. Nata Karya.
- Wesley, C., & Sitompul, G. O. (2023). Pengaruh Kebijakan Kenaikan PPN 11 Persen dan Penagihan Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Pelaku Usaha. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(3), 1625–1642. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i3.5711>
- Yani, R. E., Simandalahi, E., & Nasution, A. R. (2024). Pengaruh PPN (Pajak Pertambahan Nilai) terhadap Pendapatan Nasional. *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 15(1), 30. <https://doi.org/10.33087/eksis.v15i1.424>
- Yudistira, E. & C. & N. (2024). Pengaruh Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Pendapatan Wajib Pajak Badan Usaha di Kota Metro. *Journal of Science Research*, Vol4 No.3, 8090–8104.